

# REKONSTRUKSI KERANGKA ETIS UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUMENEP: PERSPEKTIF ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

**M Mushthafa dan Fadhilah Khunaini**

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep

[musthov@gmail.com](mailto:musthov@gmail.com)

[fadhilah.mr@gmail.com](mailto:fadhilah.mr@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini menemukan bahwa ada tiga masalah pokok yang mengemuka dalam pengembangan program pariwisata di Kabupaten Sumenep. Tiga masalah pokok itu adalah masalah desain dan fokus program pariwisata yang belum tertata secara baik (belum koheren dan berbasis data), partisipasi yang belum maksimal, dan belum mengemukakan pertimbangan keberpihakan pada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada beberapa asas dan prinsip yang perlu digarisbawahi dan dikemukakan yang kiranya dapat menjadi kerangka etis bagi pengembangan program pariwisata di Kabupaten Sumenep. Setidaknya ada tiga asas dan prinsip, yakni asas keberlanjutan, asas manfaat, adil dan merata, dan asas partisipatif.

**Kata Kunci:** pariwisata Sumenep, kerangka etis Islam, kearifan lokal

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, pariwisata merupakan sektor industri yang sangat berkembang pada tahun-tahun belakangan ini. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian yang besar pada sektor pariwisata sehingga sektor ini dijadikan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Keindahan alam dan keragaman budaya yang ada di Indonesia menjadi modal utama untuk sektor pariwisata ini.

Rencana pengembangan sektor pariwisata di tingkat nasional juga dipandang akan dapat memberikan hasil positif bagi peningkatan dan pemerataan pembangunan di daerah. Contohnya seperti pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan cukup menarik. Penelitian Al Jundi, dkk (2016: 39-41) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi memberi banyak pengaruh positif bagi perkembangan masyarakat. Di antaranya berupa munculnya perhatian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat lokal sehingga mereka memiliki kemampuan untuk ikut mengelola sektor pariwisata ini bersama-sama.

Namun demikian, pengembangan pariwisata juga memiliki beberapa masalah yang dihadapi. Wisata bahari, misalnya, yang cukup populer di Indonesia, bisa berdampak buruk pada ekosistem laut dan perairan dan juga pada budaya masyarakat lokal. Sementara ini, Indonesia memiliki reputasi buruk dalam hal penanganan sampah di kawasan laut. Sebuah riset dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai penyumbang terbesar di kawasan laut di dunia. Sekitar 187,2 juta ton sampah plastik di Indonesia berakhir di laut (Kompas, 3 April 2017).

Selain isu lingkungan terkait dengan eksploitasi alam di sektor pariwisata, yang juga bisa disebut dengan masalah jejak karbon (*carboon footprint*), industri pariwisata secara umum memuat beberapa problem etis seperti kemungkinan muncul atau berkembangnya wisata seks (termasuk di dalamnya perdagangan orang dan atau anak, atau juga kekerasan terhadap perempuan dan anak), komodifikasi kebudayaan lokal yang dapat mencederai hak-

hak dasar mereka, terancamnya kebudayaan lokal, bahkan juga bisa termasuk ancaman di bidang kesehatan berupa penularan penyakit (Nugroho, 2013: 69-79).

Aditjondro (2003: 392-395) juga mengulas dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat dalam penjelasan bahwa dampaknya dapat bertingkat/bertahap. Dampak dapat dilihat pada tahap pertama, yakni pada saat pembangunan fasilitas terkait sektor pariwisata, seperti sarana akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Kedua, pada saat jasa pariwisata telah benar-benar beroperasi sehingga meningkatkan interaksi dari berbagai pihak yang terlibat.

Dalam situasi perkembangan pariwisata nasional yang dijadikan prioritas pembangunan ini, Kabupaten Sumenep di Provinsi Jawa Timur diposisikan sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sumenep dipandang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus, meliputi wisata pantai, kuliner, hingga budaya. Untuk wisata alam, Kabupaten Sumenep memiliki Pulau Gili Iyang yang diketahui merupakan kawasan dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia (Jawa Pos, 9 April 2017).

Terkait dampak negatif yang mungkin muncul dari sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah cukup sadar. Dalam kasus yang cukup spesifik, seiring dengan mulai populernya Sumenep di mata wisatawan asing, setidaknya ada tiga kejadian yang sempat meramaikan media sosial terkait kehadiran wisatawan asing di Sumenep yang dipandang mulai meresahkan. Pertama, saat ada beberapa wisatawan asing pada bulan Maret 2017 lalu yang berkunjung ke Masjid Jamik Sumenep dan berpakaian yang

membuka aurat. Kedua, saat beberapa turis asing yang berkunjung ke Pulau Gili Labak menggunakan bikini di tempat terbuka. Ketiga, pada bulan Desember 2017 lalu pelaksanaan Sumenep Batik Festival menuai kritik karena dinilai ada unsur pencederaan nilai-nilai lokal lantaran pada ajang tersebut ada momen pameran aurat. Tiga kejadian ini sempat ramai dibicarakan masyarakat di media sosial karena dianggap meresahkan dan tidak sesuai dengan norma masyarakat di Madura (Koran Madura, 9 Desember 2017).

Paling tidak dari beberapa pengamatan sederhana, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, belum tampak upaya-upaya lebih menyeluruh baik untuk membuat desain yang utuh dan berkelanjutan maupun untuk mengantisipasi ekses-ekses pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Beberapa kritik mengemuka, di antaranya bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep belum cukup bergerak untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pengembangan pariwisata, termasukantisipasi ekses buruknya.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggali aspek normatif ajaran Islam dan juga khazanah kebudayaan lokal (Madura) yang dapat terkait dengan desain pengembangan sektor pariwisata untuk merekonstruksi kerangka etis yang lebih jelas untuk program pengembangan pariwisata. Kerangka etis ini diharapkan dapat menjadi cara pandang kritis sekaligus bersifat antisipatif terhadap dinamika pengembangan pariwisata di Sumenep. Pada tataran aplikatif, kerangka etis ini dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan sekaligus alat evaluasi atas pengembangan pariwisata terutama yang dilakukan oleh pengurus publik di Sumenep.

### **Landasan Etika Pariwisata Dalam Islam**

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar”(Baalbaki, 1995: 569, 652) atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “tourism” (Echols & Shadily, 2010: 156), secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok.

Jika dikaji secara mendalam dari istilah itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak semua makhluk yang berada di jagat raya ini tidak akan terlepas dari perjalanan, termasuk makhluk sekecil semut sekalipun, perbedaannya hanya dari motif perjalanan itu sendiri, jika semut melakukan perjalanan adalah hanya untuk mencari makan, sedangkan manusia biasanya memiliki berbagai macam motif perjalanan, ada yang motifnya untuk rekreasi (menikmati objek dan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun budaya, olah raga, mengunjungi sanak saudara, untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Arifin, 2015: 148).

Dalam Islam sektor pariwisata termasuk dalam kategori mu'amalah yang pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada praktik-praktik yang terlarang di dalamnya.

Sebagai sebuah mu'amalah yang mubah (dibolehkan) maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah tujuan spiritual, bisnis, pembelajaran, dan kesehatan.

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam Qs. Ankabut (29) : 20, Allah berfirman, yang artinya : “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan perniagaan ke Yaman dan Syam (Shihab, 2002: 537-538), begitu juga penegasan Allah Swt dalam Qs. al-Jumuah (62) : 10 Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan ”anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah”. Imam Ali r.a berkata, “Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu” (Ibnu Katsir, 1986: 554).

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137, Allah berfirman, artinya “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah.” Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya *Mahasin al-Ta’wil* mengatakan: “Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang terpendam, ranjang-ranjang tidur yang indah, beserta segala pernik-perniknya yang pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia, kini telah lenyap dan tidak bernilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya” (al-Qasimi, t.t.: 36).

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-

hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada Sang Khaliq, firman Allah dalam Qs. Al-Ghasyiah (88) : 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat-ayat kauniah .

Selain itu, menemui kerabat dan sanak-saudara dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi, merupakan tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim (dalam Sahih Bukhari kitab adab bab man yabsud lahu rizquhu bi shila al-rahim, no 5640, juz 5, hal 2232 dan Sahih Muslim kitab Adab bab shila al-Ramim wa tahrim qathi'iha, no 2557, juz 4, hal 1982), disebutkan bahwa silaturahmi akan memberikan kebaikan, membuka luas rezeki, membersihkan jiwa, dan mendapat keberkahan hidup. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi wisata rohani, seperti kunjungan ke rumah ibadah, Tadabbur Alam (wisata alam), tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

### **Prinsip Pariwisata menurut Islam**

Pandangan agama terhadap aksi sosial dan amaliah senantiasa disandarkan kepada makna kaidah yang disebut maqashid al-syari'ah (al-Jauzi, 1973: 25). Dalam hal ini, pariwisata yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi, dalam pelaksanaannya harus senantiasa di dasarkan kepada maqashid syari' demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat.



Di samping itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan: "Menghindari (timbulnya) keburukan (harus) diutamakan dari mengambil kebaikan".

Di dalam kaitan ini maka bila pengelolaan sebuah dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan Islam niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).

Oleh karena itu, pandangan Islam akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Islam akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan syariat, maka hal itu ditolak.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini kiranya dapat memadukan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan-batasan tujuannya diarahkan untuk memperkokoh iman dan memupuk akhlak dan penyelenggaraannya tidak mempraktikkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

Oleh karena itu menjadikan pariwisata sebagai sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah diperbolehkan oleh Islam

selama tidak melanggar batas halal-haram, maka semua komponen mulai dari pihak Pemerintah hingga lapisan masyarakat mesti memahami etika berwisata yang antara lain meliputi :

1. Aktivitas bisnis (muamalah madhiyah) dalam mengelola objek pariwisata tidak dibenarkan menjalankan bisnis, objek wisata yang terdapat unsur judi (maisir), riba, dan gharar dan bisnis yang dilarang lainnya.

2. Menyediakan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wisatawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa takut dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang tidak jelas haram-halalnya.

3. Objek wisata yang ditawarkan adalah objek yang boleh dan layak untuk disaksikan.

4. Pengelolaannya dikaitkan dengan kepentingan dakwah seperti peringatan atau himbauan yang religius pada tempat-tempat tertentu atau membuat brosur-brosur yang berisi penjelasan yang bernuansa agama.

### **Prinsip Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Nilai-Nilai Islam**

Dalam upaya mewujudkan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktik-praktik pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan (Arifin, 2015: 162).

Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai tujuan dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Perlu di tekankan pentingnya tujuan-tujuan mulia dari kegiatan pariwisata. Sebab di dalam Islam, semua aktifitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah. Yang diperlukan bagi para ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia yang terbimbing ke arah yang baik dan benar, terjauh dari yang berbau maksiat.

2. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya.

3. Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.

4. Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya.

5. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

### **Perspektif Kearifan Lokal Madura tentang Pariwisata**

Madura, cukup sering diidentikkan dengan kekerasan. Carok menjadi salah satu kata kunci dan indikator untuk menggambarkan sisi keras Madura tersebut. Demikian juga karapan sapi yang juga memiliki nuansa kekerasan seperti semakin mempertegas dimensi kekerasan tersebut.

Namun demikian, citra dan identitas kekerasan ini merupakan cara pandang yang tidak utuh dan bercampur dengan prasangka. Mohamad Fauzi B. Sukimi (2004: 107) mengemukakan bahwa carok seolah menafikan sisi lembut dan ramah orang Madura. Padahal, Madura memiliki sisi lembut dan memiliki khazanah yang penuh dengan kehalusan dalam budaya. Sukimi mengemukakan kajian D. Zawawi Imron tentang kesusastraan Madura yang menunjukkan kelembutan dan kepekaan orang Madura dalam menangkap pesan-pesan alam dan lingkungan, dan juga penelitian Helene Bouvier tentang kesenian musik dan seni pertunjukan Madura yang mempertegas dimensi lembut kebudayaan Madura.

Penelitian Dr A Latief Wiyata (2002) yang berusaha mengungkap makna simbolis carok dalam konteks budaya Madura

memberikan perspektif yang lebih berimbang tentang carok. Latief, yang meneliti enam kasus carok di Kabupaten Bangkalan mulai Agustus 1995 hingga Juni 1996 menyimpulkan bahwa carok adalah mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan unsur pelecchan harga diri. Menurut Latief, belum adanya pranata sosial yang dapat memuaskan orang Madura untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan nilai lokal pada akhirnya menempatkan carok sebagai jalan alternatif penyelesaian masalah.

Sementara itu, berkaitan dengan karapan sapi, orang luar Madura lebih sering mengaitkan sapi dan orang Madura dalam kerangka kekerasan sebagaimana terlihat dalam pertunjukan karapan sapi. Padahal, selain karapan sapi, orang Madura juga memiliki seni pertunjukan terkait sapi yang menunjukkan dimensi kelembutan, yakni *sape sono*. Mohammad Afifi (2007) menyebut *sape sono* ini sebagai kontes kecantikan sapi Madura karena dalam pertunjukan *sape sono* yang ditekankan adalah dimensi lembut dengan berbagai nuansanya yang dipertunjukkan kepada penonton pada sebuah pertunjukan. Dalam pertunjukan *sape sono* ini, sapi yang tampil tidak saja dipoles dan diperlakukan sedemikian rupa dengan penuh kelembutan dan keanggunan, juga diiringi dengan syair-syair dan musik.

Sisi lain yang menggambarkan kelembutan orang Madura ini sangat penting untuk digali karena bagaimanapun, dalam kaitannya dengan pariwisata, keramahan dalam menyambut dan memperlakukan tamu (*hospitality*) adalah poin penting yang perlu diperhatikan. Dalam hal keramahan dan penghormatan terhadap orang lain atau tamu pada khususnya, kita bisa menggali nilai dan

pandangan orang Madura dalam ungkapan-ungkapan bijak Madura yang merupakan khazanah Madura yang dapat menggambarkan pandangan dasar orang Madura.

Prof. Mien Ahmad Rifai dalam buku *Manusia Madura* menggambarkan perhatian orang Madura terhadap soal sopan santun bertamu dan menerima tamu.

Di Madura menjadi kewajiban orang yang punya rumah untuk segera menerima dan menyambut tamu yang mendatangnya. Membiarkan tamu lama duduk sendirian tidak ditemui (dan kemudian juga tidak segera disuguh) akan menyebabkan seseorang dikatakan korang loghâbâ (kurang berbesar hati) dalam menerima tamunya. Selanjutnya tamu harus disuguhi sesuatu sepantasnya. Tata etika masyarakat Madura mengisyaratkan agar tamu tidak dibiarkan merasa etarang (dicangcang di terik matahari) dan mara anggu' tadâ' mecet (seperti penjepit janggut tak ditekan) karena lama tidak disuguh apa-apa sama sekali. Dengan demikian para tamu tidak perlu sampai harus naļec tabu' (mengikat perut) sebab menahan lapar (Rifai, 2007: 291).

Penghormatan berupa penyajian suguhan ini adalah gambaran tentang sopan santun orang Madura terhadap tamu. Bahkan, dalam praktik tradisional, tamu di Madura tidak boleh pulang sebelum mendapatkan suguhan makanan berat (nasi) meskipun seadanya.

Selain itu, kehormatan dan sopan santun bertamu haruslah tetap dijaga baik oleh tuan rumah maupun tamu. Jika tuan rumah diharapkan dapat memberikan suguhan dan keramahan yang baik, tamu juga harus mampu mengekang sifat serakah dalam menikmati sajian yang disuguhkan. Dalam ungkapan Madura, jika ada tamu yang

menghabiskan semua suguhan yang disajikan di hadapannya akan disebut bagaikan posapo panda' (sapu pendek), ghilingan tejha' (gilingan mengkilap), atau akanta galte' nemmo padi (seperti gelatik ketemu padi). Ada juga ungkapan embi' ambha ka pakacangan (kambing terlepas ke kebun kacang) untuk menggambarkan situasi semacam ini. Dari ungkapan-ungkapan ini, ukuran serakah atau rakus di sini tampaknya terkait dengan perihal kemampuan untuk mengendalikan diri saat bertamu (Rifai, 2007: 293).

Bentuk kendali diri yang dipandang kurang baik juga terdapat dalam kasus tamu yang segera pamit setelah mendapatkan suguhan. Orang Madura menyebutnya bungle, mon la kembang mole (setelah kembang pulang, atau dalam ungkapan populer disebut SMP atau sesudah makan pulang). Di sisi lain, tuan rumah juga harus bersikap penuh pengertian jika tamu tampak sudah hendak pamit. Tuan rumah tak boleh sampai terkesan menahan atau mengekang tamu sehingga sungkan untuk berpamitan. Dalam ungkapan Madura, jangan sampai tamunya merasa ekenneng panggher (menjadi terkekang) (Rifai, 2007: 294).

Selain perihal keramahan dan sopan santun bertamu, ada lagi khazanah lokal Madura yang dapat dikemukakan di sini yang cukup relevan dan kontekstual dalam era kini. Hal ini terkait dengan tata ruang di pemukiman di Madura yang oleh banyak sosiolog maupun antropolog dijelaskan sebagai bagian dari pandangan dunia orang Madura.

Dalam sistem pemukiman tradisional Madura, dikenal yang disebut dengan istilah tancyan lanjhang. Dalam sebuah tancyan lanjhang rumah-rumah dibangun berderet dari barat ke timur dalam

posisi selalu menghadap ke selatan. Anak perempuan pertama biasanya akan tinggal di rumah paling barat. Di seberang deretan rumah-rumah tersebut biasanya terdapat dapur untuk masing-masing keluarga. Di belakang dapur biasanya terdapat kandang sapi juga untuk masing-masing keluarga. Di ujung barat sistem tanceyan lanjhang terdapat langgar atau surau.

Langgar atau surau ini tidak hanya dipergunakan sebagai tempat beribadah (shalat) tapi juga digunakan untuk menerima semua tamu laki-laki. Menurut A. Latief Wiyata, penggunaan langgar sebagai tempat menerima tamu ini menggambarkan perhatian dan perlindungan orang Madura terhadap kaum perempuan. Orang Madura tidak ingin agar anggota keluarga mereka yang perempuan mendapatkan perilaku negatif bernuansa seksual dari tamu-tamu laki-laki sehingga tamu laki-laki ditempatkan di langgar di ujung barat tanceyan lanjhang. Karena pintu masuk tanceyan lanjhang ada di timur, maka dengan menempatkan tamu di ujung barat ini membuat tamu tidak akan cukup leluasa jika tertangkap ada niat buruk dan mau “melarikan diri” (Wiyata, 2002: 46-47).

A. Latief Wiyata menempatkan pola pemukiman tanceyan lanjhang ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan, karena dalam masyarakat Madura perempuan juga terkait dengan unsur kehormatan diri yang di antaranya dapat menjadi salah satu pemicu utama terjadinya carok.

Pintu masuk tanceyan lanjhang dan juga pintu rumah dan penempatan tempat tidur perempuan di dalam kamar juga menegaskan aspek perhatian dan perlindungan terhadap kaum perempuan ini.



Kemudian, apa kaitannya dengan konteks diskursus pariwisata?

Dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat melihat konteks sosiologis perhatian dan perlindungan terhadap kaum perempuan di Madura, bahwa kaum perempuan dipandang sebagai kelompok yang rentan untuk mendapatkan perlakuan baik oleh tamu yang semula tidak memiliki niatan jahat atau dari orang luar yang memang sengaja untuk berbuat tidak baik. Dalam konteks pariwisata saat ini, kita dapat melihat bahwa secara sosiologis, juga politik dan ekonomi, ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Madura yang berada dalam posisi rentan, seperti halnya kerentanan kaum perempuan dalam konstelasi tanyan lanjhang.

Untuk itulah dalam konteks program pariwisata maka kiranya penting memberi perhatian pada kelompok-kelompok rentan ini, seperti halnya perhatian dan perlindungan yang diberikan oleh orang Madura terhadap perempuan melalui tanyan lanjhang. Dilihat secara mendalam, perlindungan terhadap kaum perempuan dalam tanyan lanjhang dapat dilihat sebagai solusi kultural-sosiologis yang bersifat sistematis, bukan melulu perlindungan yang bersifat sporadis. Ini penting untuk digarisbawahi sebagai bagian dari cara pandang budaya orang Madura.

### **Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep**

Potensi wisata di Sumenep sangat beragam. Laman Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep ([www.wisatasumenep.com](http://www.wisatasumenep.com)) membuat beberapa kategori objek wisata di Kabupaten Sumenep, meskipun kategori-kategori tersebut tidak

terisi data faktual. Ada tujuh kategori objek wisata yang ditampilkan di situ, yakni wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi, wisata kesehatan, wisata kepulauan, wisata minat khusus, dan wisata sejarah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tim penelitian ini, dengan menghimpun data dari berbagai sumber, paling tidak ada beberapa objek wisata di Kabupaten Sumenep yang selama ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat, antara lain:

No	Objek Wisata	Tempat	Jenis
1	Asta Tinggi	Kota Sumenep	Religi/Sejarah
2	Kraton Sumenep	Kota Sumenep	Sejarah/Budaya
3	Museum Sumenep	Kota Sumenep	Sejarah/Budaya
4	Pantai Lombang	Batang-Batang	Alam
5	Pantai Slopeng	Ambunten	Alam
6	Pantai Sembilan	Gili Genting	Alam
7	Pantai Badur	Batuputih	Alam
8	Gili Labak	Talango	Alam
9	Gili Iyang	Dungkek	Kesehatan/Alam
10	Asta Katandur	Kota Sumenep	Religi
11	Asta Gumuk Kertasada	Kalianget	Religi
12	Asta Sayyid Yusuf	Talango	Religi
13	Asta Panongan	Pasongsongan	Religi
14	Asta Jokotole	Manding	Sejarah
15	Goa Payudan	Guluk-Guluk	Sejarah
16	Situs Benteng	Kalianget	Sejarah
17	Situs Batogung	Gayam, Sepudi	Sejarah
18	Kampung Keris	Aeng Tong Tong	Minat khusus
19	Tirta Sumekar Asri	Batuan	Buatan
20	Water Park Sumenep	Manding	Buatan
21	Taman Tectona	Batuan	Buatan
22	Bukit Tinggi	Lenteng	Buatan

Di antara objek-objek wisata tersebut, ada yang di antaranya masih memuat beberapa situs khusus dengan kekhasan tersendiri. Misalnya, objek wisata Kraton Sumenep, memuat beberapa titik

wisata, seperti labhang mesem dan taman sare yang cukup populer di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Beberapa potensi wisata memang baru dipopulerkan belakangan. Misalnya, kampung keris di Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Saronggi. Desa Aeng Tong Tong sebenarnya sudah cukup lama dikenal sebagai kawasan penghasil kerajinan keris. Bahkan di tingkat nasional, desa ini sangat dikenal di kalangan pegiat dan pencinta benda pusaka. Namun, popularitas dan perhatian terhadap desa ini semakin kuat setelah Sumenep dinobatkan sebagai Kota Keris pada bulan Agustus 2017. Penghargaan itu diberikan induk paguyuban keris Indonesia, Senopati Nusantara, pada acara Senopati Nusantara Award di Pendapa Keraton Sumenep pada hari Jumat, 11 Agustus 2017. Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati A. Busyro Karim. Penghargaan tersebut diberikan karena Sumenep merupakan daerah dengan perajin keris terbanyak di Indonesia, yang pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 648 perajin (Radar Madura, 12/08/2017).

Selain itu, semakin populernya sektor pariwisata juga mendorong munculnya objek wisata buatan seperti Taman Tectona dan Bukit Tinggi di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dengan memanfaatkan unsur potensi alam dan dengan diberi muatan pendidikan dan hiburan, wisata-wisata buatan ini tampak memperoleh sambutan yang cukup hangat dari masyarakat. Taman Tectona, misalnya, dilaporkan mampu menyedot pengunjung hingga 500 orang per hari dan bisa mencapai 2000 pengunjung di hari-hari libur tertentu (Media Madura, 03/01/2018).

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep dapat tergambar dari jumlah kunjungan wisatawan ke objek-objek

wisata di Kabupaten Sumenep. Berikut ini data kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara antara tahun 2012 hingga 2016:

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Sumenep

Tahun	Wisatawan		Total
	Mancanegara	Domestik	
2012	133	993.275	993.408
2013	143	851.756	851.899
2014	387	544.245	544.632
2015	417	626.926	627.343
2016	1332	854.614	855.946

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep (BPS Sumenep, 2017: 332).

Secara lebih spesifik, pengunjung objek wisata di Kabupaten Sumenep dapat dicermati lebih dalam lagi terkait objek wisata yang paling banyak dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Berikut ini datanya pada tahun 2015 dan 2016:

No	Objek Wisata	2015		2016	
		Mancanegara	Domestik	Mancanegara	Domestik
1	Makam Raja Asta Tinggi	11	198.518	109	224.560
2	Museum Kraton Sumenep	165	43.603	289	44.068
3	Pantai Lombang	131	62.494	244	49.413
4	Pantai Slopeng	40	37.795	52	37.570
5	Asta Syekh Yusuf	6	84.048	11	159.711
6	Asta Panaongan	0	12.037	0	73.804
7	Situs Banteng	47	1.411	26	1.484
8	Situs Batogung	8	5.193	2	1.898

9	Water Park Sumenep	9	76.490	1	68.220
10	Asta Katandur	0	53.866	0	5.717
11	Asta Gumuk Kertasada	0	27.756	0	47.939
12	Tirta Sumekar Asri	0	20.531	0	22.492
13	Masjid Jamik Sumenep	0	51.184	222	42.991
14	Asta Joko Tole			0	10.651
15	Asta K Faqih			0	5.185
16	Gili Yang			38	6.165
17	Gili Labak			300	33.419
18	Gua Pajuddan			0	2.026
19	Pantai Badur			6	13.960

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep (BPS Sumenep, 2017: 334-335).

### Visit Sumenep 2018

Program unggulan Pemkab Sumenep ini diluncurkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara (Deputi BP3N) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Esthy Reko Astuti bersama Bupati Sumenep Busyro Karim dan Wakil Bupati Achmad Fauzi, di Balai Soesilo Soedirman, Gedung Saptas Pesona Jakarta, Kantor Kemenpar, Selasa, 5 Desember 2017. Program ini adalah upaya mempromosikan potensi pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumenep. Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan kunjungan 15.000 wisatawan mancanegara (wisman) dan 1,1 juta wisatawan domestik (Koran Madura, 05/12/2017).

Saat diluncurkan, pemerintah Kabupaten Sumenep juga merilis 39 kegiatan unggulan yang akan digelar dalam setahun penuh

sepanjang 2018. Ketiga puluh sembilan kegiatan itu adalah sebagai berikut:

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal/Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
Januari	17 Januari 2018	Sumenep Mengukir
Februari	15 Februari 2018	Batik on The Sea
Maret	17 Maret 2018	Kontes Kucing Internasional
April	14-15 April 2018	Gathering Media, dan Pelaku Usaha Pariwisata se-Indonesia
Mei	2-5 Mei 2018	Pameran Lukisan
	5-9 Mei 2018	Kejuaraan Catur Jawa Timur
	9 Mei 2018	Gebyar Mancing Internasional
	Pertengahan Ramadhan/Mei 2018	Pekan Tilawatil Qur'an Nasional RRI
Juni	11 Juni 2018	Prosesi Upacara Adat Penyerahan Zakat Fitrah Keraton Sumenep
Juli	14-15 Juli 2018	Festival Kuliner Indonesia
	21-23 Juli 2018	Pelangi di Sumenep, Berbagai Festival
Agustus	5 Agustus 2018	Karapan Sapi Tradisional
	13-15 Agustus 2018	Pameran Keris Internasional dan Peresmian Museum Pusaka Sumenep
	24-26 Agustus 2018	Festival Budaya Sumenep
September	2 September 2018	Jalan-jalan Santai 5.000 Egrang
	7-8 September 2018	Festival Topeng Dalang Sumenep
	16-17 September 2017	Jamasan Kirap Pusaka Kratonz Sumenep
Oktober	5-7 Oktober 2018	Festival Kreasi Pemuda Indonesia
	21 Oktober 2018	Kontes Sape Sonok
	22-26 Oktober 2018	Pameran Pembangunan dan Sumenep Expo

	24 Oktober 2018	Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kacong Cebbing
	25 Oktober 2018	Rokat Tasek Akbar
	25 Oktober 2018	Istighasah Haul Raja-raja Sumenep dan Hari Santri Nasional
	27-31 Oktober 2018	Festival Keraton dan Masyarakat Adat se-Asean
November	4 November 2017	Ngontel Wisata Sehat Pulau Oksigen
	11 November 2018	Sumenep Spektakuler
	18 November 2018	Sumekar Heart 10 Km
	25 November 2018	Puncak Peringatan Hari Guru Nasional
	26-28 November 2018	Festival Pencak Silat Pesisir
Desember	15-16 Desember 2018	Festival Batik Nusantara
	16 Desember 2018	Tangkastrail Mania
	31 Desember 2018	Gema Sholawat Sejuta Umat

Diolah dari Kompas Online, 6 Desember 2017.

Program tahun kunjungan Sumenep 2018 (Visit Sumenep 2018) ini juga mendapatkan dukungan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dijadikannya Sumenep sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

Selain dari peluncuran program dan kalender kegiatan, upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mensukseskan program Visit Sumenep 2018 pada khususnya dan program pariwisata pada umumnya juga dilakukan dengan peningkatan fasilitas pendukung. Salah satunya adalah Bandar Udara Trunojoyo Sumenep. Bandar udara ini sebenarnya sudah diresmikan pengoperasiannya pada tahun 2010. Namun, bandara yang waktu itu memiliki landasan sepanjang

800 meter belum digunakan untuk penerbangan komersil. Baru pada bulan September 2017 bandara ini melayani penerbangan komersil jalur Sumenep-Surabaya pulang pergi (detik.com, 30/11/2010; Kompas Online, 27/09/2017). Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan mutu layanan transportasi udara di Kabupaten Sumenep terus ditingkatkan.

### **Masalah-Masalah Pariwisata di Kabupaten Sumenep**

Dunia pariwisata yang belakangan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep juga turut mendapatkan perhatian dari masyarakat. Salah satu masalah pokok yang paling disorot dalam masalah pariwisata di Kabupaten Sumenep adalah minimnya desain pengembangan yang cukup jelas sehingga bahkan program Visit Sumenep 2018 pun tampak dirancang kurang matang, kurang sistematis, dan kurang padu.

Sebelum memasuki tahun 2018, pemerintah Kabupaten Sumenep di dalam berbagai kesempatan mengemukakan kepada publik bahwa akan menjagokan wisata alam di Pulau Gili Iyang yang terkenal karena kandungan oksigennya termasuk yang terbaik di dunia. Sebelum masuk 2018, beberapa media nasional pun bahkan sempat menyebut dan menurunkan liputan singkat tentang Pulau Gili Iyang ini. Namun, meski sudah ada niatan demikian, kenyataannya sepanjang 2018 tidak tampak upaya yang cukup serius dan sistematis untuk mengorbitkan objek wisata Gili Iyang ini.

Salah satu indikatornya adalah belum tersedianya sarana transportasi yang layak dan memadai ke Pulau Gili Iyang tersebut. Pulau Gili Iyang adalah sebuah pulau kecil yang masuk wilayah



Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Kecamatan Dungkek adalah salah satu kecamatan paling timur di wilayah Pulau Madura atau Kabupaten Sumenep. Di wilayah tenggara Pulau Madura memang terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang di antaranya Pulau Gili Iyang. Pulau Gili Iyang berada di timur Pulau Madura, berjarak sekitar 35 kilometer. Untuk mencapai pulau ini, biasanya bertolak dari pelabuhan kecil di Dungkek, ditempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan perahu mesin.

Untuk transportasi lokal, di Pulau Gili Iyang sejauh ini masih menggunakan kendaraan bermotor yang disebut odong-odong. Sejumlah kalangan menilai bahwa ini tidak cocok dengan keunggulan pulau yang memiliki kualitas oksigen terbaik tersebut. Polusi kendaraan bermotor dalam jangka panjang tentunya justru akan menurunkan kualitas oksigen di pulau tersebut.

Terkait ketersediaan infrastruktur, K.H. A. Pandji Taufiq, ketua tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep, menyatakan sempit malu saat ada salah seorang kenalannya yang mengeluhkan infrastruktur transportasi ke Gili Labak, pulau kecil lainnya di Kabupaten Sumenep yang belakangan menjadi populer karena pantai, laut, dan lingkungannya masih perawan dan asri.

Meski sudah dinyatakan akan dijadikan ikon andalan dalam program Visit Sumenep 2018 atau Tahun Kunjungan Sumenep 2018 (Koran Jakarta, 26/12/2016, Tempo, 13/4/2017), ternyata dalam praktiknya “wisata kesehatan” Pulau Gili Iyang tak memperlihatkan daya tariknya karena memang tidak adanya desain yang matang dari pengembangan pariwisata di Sumenep, khususnya terkait program

Visit Sumenep 2018. Menurut laporan Koran Madura (4/4/2018) pada bulan April 2018, pengunjung Pulau Gili Iyang kalah jauh dengan pengunjung Pantai Sembilan di Pulau Gili Genting yang notabene bukan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep, kunjungan wisatawan ke Pulau Gili Iyang pada bulan Januari dan Februari 2018 hanya 197 wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sementara itu, jumlah kunjungan wisata ke Pantai Sembilan mencapai 7.030 orang—60 di antaranya wisatawan mancanegara.

Penyediaan infrastruktur sebagai bagian dari desain pengembangan pariwisata mestinya mendapatkan perhatian di tengah keterbatasan yang ada di daerah, termasuk keterbatasan anggaran. Syaf Anton WR dalam sebuah wawancara mengemukakan kritik bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep kerap menclantarkan sebuah titik objek wisata saat mengunggulkan objek wisata baru lainnya di Sumenep. Syaf Anton memberi contoh pada akhir 1980-an Pantai Slopeng di Ambunten begitu populer. Namun ketika daya tarik wisata Pantai Lombang di Batang-Batang mulai dikenal luas, Pantai Slopeng lalu menjadi terlantar (Majalah Fajar, Edisi XXI, Vol. XV/Oktober 2017, halaman 15).

Adanya desain yang menyeluruh tentunya juga memperlihatkan fokus yang tepat dalam penyusunan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Jika kita mencermati 39 rangkaian kegiatan Visit Sumenep 2018 (lihat halaman 35-36) yang dirancang berlangsung selama satu tahun, tak terlihat fokus, tema, dan atau penekanan yang jelas. Bahkan,

rancangan ini tampak kurang mencermati, misalnya, data lapangan pariwisata di Sumenep yang terkait dengan daya tarik wisatawan yang selama ini sudah ada. Padahal, data tersebut cukup layak untuk dijadikan pertimbangan titik objek manakah yang akan diunggulkan dan diberi dukungan khusus untuk pengembangan pariwisata di Sumenep.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, pada tahun 2015 dan 2016, kategori wisata religi mendapatkan kunjungan terbanyak khususnya dari wisatawan domestik. Tiga objek wisata religi yang paling banyak dikunjungi pada periode itu adalah Asta Tinggi (makam raja-raja Sumenep), Asta Yusuf di Pulau Talango, dan Asta Panaongan. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, Kraton Sumenep dan Pantai Lombang (dan Gili Labak untuk tahun 2016) mendapatkan kunjungan terbanyak (BPS Sumenep, 2017: 334-335).

Data ini sebenarnya sangatlah bernilai untuk dijadikan pijakan bagi penentuan fokus pengembangan wisata dan rangkaian program pendukung lainnya yang mestinya ditetapkan sehingga kebijakan pengembangan pariwisata tidaklah terlalu jauh dari apa yang selama ini ada di lapangan (berbasis data) sebagai sebuah potensi yang sudah terwujud.

Kenyataannya, dukungan pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap objek wisata yang menurut data dinas terkait paling banyak mendapatkan kunjungan justru sangat minim. Ketua PCNU Sumenep menyampaikan bahwa fasilitas pendukung di kompleks Asta Tinggi masih sangat memprihatinkan, seperti mushalla/masjid, kamar mandi, tempat istirahat, dan sebagainya.

Sampai di sini kita dapat simpulkan bahwa salah satu masalah pengembangan pariwisata di Sumenep terkait dengan desain pengembangan yang belum jelas dan belum secara maksimal mempertimbangkan data-data lapangan sehingga fokus dan arah programnya tidak efektif.

Selain masalah desain program, pariwisata Sumenep juga bermasalah dari sudut pandang partisipasi masyarakat. Dalam wawancara dengan Majalah Fajar terbitan LPM Instika, Ketua PCNU Sumenep, K.H. A. Pandji Taufiq menyampaikan bahwa mestinya rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan haruslah dilibatkan secara aktif dalam program-program pengembangan pariwisata sehingga di sisi lain juga dapat merasakan manfaatnya. Partisipasi di sini terkait gagasan dan keterlibatan langsung dalam program yang dilaksanakan.

Memang, secara konseptual, pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya untuk membangun wisata berbasis warga. Harian Kompas edisi 29 Agustus 2017 menurunkan berita berjudul “Sumenep Garap Wisata Berbasis Warga”. Pada waktu itu, dalam konteks pariwisata di Pulau Gili Iyang, pemerintah Kabupaten Sumenep bermaksud akan memberdayakan rumah-rumah warga sebagai penginapan para wisatawan, menyediakan kapal cepat yang melibatkan warga menjadi anak buah kapal, menyalurkan sepeda gunung yang dikelola warga untuk digunakan sebagai transportasi lokal, dan juga pemandu wisata. Namun demikian, rencana ini tampak tak berjalan sukses sehingga sampai pelaksanaan program Visit Sumenep 2018, Pulau Gili Iyang tidak mendapatkan kunjungan yang meningkat secara signifikan.

Secara khusus, ada yang menilai bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum mampu menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang berpotensi dilibatkan, termasuk dunia usaha sebagai investor. Ketua Program Studi Pariwisata Perhotelan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Faidlal Rahman, SE.Par., M.Sc, yang kebetulan putra Sumenep, mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep agar mampu memfasilitasi pihak investor untuk bisa membantu program pengembangan pariwisata. Keuangan daerah tentu tidak cukup jika dikerahkan untuk sektor pariwisata semuanya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus mampu mendorong partisipasi investor (Koran Madura, 14/4/2017).

Namun demikian, soal pelibatan pihak-pihak tertentu khususnya dari kalangan usaha juga mendapatkan perhatian dari beberapa pihak. Hal ini terkait dengan masalah keberpihakan dan sekaligus juga perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan di Kabupaten Sumenep, khususnya yang rentan secara ekonomi, politik, dan budaya. Pertanyaan mendasarnya adalah: ke manakah arah keberpihakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep? Kalau dari sudut pandang norma Islam, apakah pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep dapat memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah atau hanya akan memberikan keuntungan pada elite-elite sosial-ekonomi saja? Aspek perlindungan juga akan terkait dengan dimensi budaya dalam pariwisata. Pertanyaannya adalah: apakah ada antisipasi perlindungan bagi khazanah budaya lokal jika pariwisata Sumenep berkembang lebih jauh?

Unsur keberpihakan dan perlindungan kelompok rentan ini mendapatkan perhatian khususnya dari kalangan aktivis atau pegiat sosial di Sumenep. Di tengah minimnya ruang publik yang dapat digunakan elemen-elemen masyarakat untuk mengemukakan gagasan dan permasalahan yang dihadapinya, media sosial tampak dapat menjadi ruang alternatif untuk mengemukakan gagasan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, ada juga komunitas-komunitas lokal yang dalam beberapa kesempatan juga menyinggung isu-isu pariwisata, khususnya di wilayah agraria.

Isu keberpihakan ini, misalnya, sempat muncul di media sosial Facebook dalam akun A. Dardiri Zubairi yang mengangkat masalah pembangunan bandar udara di Sumenep dalam konteks ini dalam posting tertanggal 16 September 2018. Posting lengkapnya sebagai berikut:

### **64 Milyar Untuk Bandara?**

Membaca berita bahwa bandara Trunojoyo Sumenep akan diperluas dan butuh 64 milyar untuk pembebasan lahan, saya manggut-manggut. Kebijakan ini menurut saya makin menegaskan bahwa petinggi kita makin tumpul kepekaannya memahami "kepentingan umum".

Saya tidak akan mengusik keberadaan bandara. Saya tidak menentang perluasan bandara. Meski "kepentingan umum" yang dimaksud pada perluasan bandara menunjuk pada kelas menengah yang makin manja terhadap mode transportasi, ya sudah, rakyat kecil yang hanya bisa melihat "layangan besi" terbang di langit terpaksa menerima. Masalahnya, perluasan bandara yang sering diklaim untuk kepentingan

umum itu seharusnya jangan menginjak kepentingan umum yang lebih luas dong.

Dulu saya pernah menulis status soal 4 akses jalan melalui BLK parsanga, dari kota, dari pabian, dan dari kaliangget yang ditutup paksa. Jalan ini setiap hari dilalui ribuan orang yang menggunakan motor dan mobil. Karena ditutup paksa sejak ada perluasan bandara yang dimulai sejak bulan Desember 2015 hingga bandara beroperasi di tahun 2017, pengguna akses jalan itu harus memutar melalui kacongan atau kota dan terus ke pabian (begitu juga dari arah kaliangget) yang tentu saja harus menempuh jarak lebih jauh sekitar 4-5 km.

Bayangkan, setiap pengguna jalan harus merogoh uang lebih banyak lagi untuk membeli bahan bakar. Jika setiap pengguna jalan untuk memutar 3-5 km butuh biaya Rp. 500 maka penutupan paksa akses jalan karena pembangunan bandara benar-benar merugikan rakyat. Mari kita hitung, taruh saja pengendara motor yang dirugikan berjumlah 2 ribu/hari (saya menduganya lebih). Berarti  $500 \times 2.000 = 1$  juta. Jika sebulan 30 juta. Jika setahun 360 juta. Jika 2 tahun 720 juta. Pada hal, akses jalan karena pembangunan bandara sudah berlangsung dari bulan desember 2015-sekarang. Jadi rakyat sudah dirugikan kira kira 1 milyar hanya dari penggunaan bensin untuk menempuh jalan memutar akibat keberadaan bandara Trunojoyo. Ini baru kerugian secara ekonomi.

Nah, jika bandara masih akan dikembangkan dan menghabiskan 64 milyar dari APBD hanya untuk pembebasan lahan ya kebangetan. Mestinya pemerintah daerah mendahulukan kepentingan (yang benar-benar) umum, kepentingan rakyat kecil yang tiap hari lalu lalang di kawasan bandara. Carikan

jalan alternatif buat rakyat. Bangun dulu. Biarkan rakyat enak juga. Baru jika ini sudah selesai, pemerintah daerah silahkan mikir bandara lagi.

Permasalahan kedua, pembebasan lahan lagi di kawasan bandara pasti akan menyasar lahan pertanian yang sebenarnya sudah diatur dalam perda PLP2B (perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan). Kita berharap pak dewan mengkaji secara menyeluruh sebelum anggaran pembebasan lahan dianggarkan, lihat dulu rencana itu bertabrakan dengan perda PLP2B? Meski kita tahu, selama ini PERDA hanya jadi peraturan yang membisu.

Poin penting postingan ini adalah soal pembangunan infrastruktur pariwisata dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok yang diuntungkan dan kelompok-kelompok yang dirugikan. Postingan ini menggugat bahwa pembangunan infrastruktur kurang mempertimbangkan masyarakat umum sehingga mereka dirugikan.

Pembangunan bandara itu sendiri memang dirancang untuk mendukung program pariwisata. Namun ternyata, karena koordinasi yang lemah, terlihat jelas bahwa infrastruktur yang dibangun dengan biaya mahal dan bahkan—jika menggunakan perspektif A. Dardiri Zubairi—mengorbankan kepentingan sekelompok masyarakat tertentu tidak maksimal untuk mempromosikan program pariwisata di Sumenep. Bupati Sumenep bahkan secara khusus pernah mengritik bawahannya karena misalnya di bandara tidak ada papan-papan informasi yang tampak jelas sehingga pengguna bandara dapat langsung mengetahui kegiatan-kegiatan pariwisata di Sumenep begitu mereka turun dari pesawat (Koran Madura, 13/10/2018).



Selain pembangunan bandara, sejumlah aktivis di Sumenep juga sempat menyoroti persoalan lahan atau agraria yang belakangan cukup mengemuka. Beberapa tahun terakhir, di bagian timur Kabupaten Sumenep pada khususnya marak terjadi pembelian lahan yang arahnya dibangun usaha-usaha dalam skala besar, seperti tambak. Di beberapa titik, hal ini meresahkan warga karena di antaranya berdampak pada lokasi wisata, seperti yang berada di dekat Pantai Lombang, Batang-Batang.

Gugatan warga sudah disampaikan, seperti oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lombang Suryadi, yang khawatir pada salah satu efek negatif dari tambak udang yaitu pembuangan limbah (Radar Madura, 20/09/2017). Pada Peringatan Hari Santri Nasional 2017, PCNU Sumenep juga memberikan dukungan berupa maklumat agar pemerintah memperhatikan program pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan dampak buruknya (NU Online, 23 Oktober 2017).

Sampai di sini paling tidak kita bisa mencatat tiga masalah pokok dalam program pariwisata di Kabupaten Sumenep, yakni masalah desain dan fokus program, partisipasi masyarakat, dan masalah keberpihakan.

### **Kerangka Etis Pariwisata Sumenep**

Setelah memetakan masalah-masalah pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep, pembahasan akan mencoba merumuskan kerangka etis untuk program pariwisata di Kabupaten Sumenep. Rumusan kerangka etis ini pertama akan menegaskan nilai-nilai dasar yang rentan tercederai sebagai akibat buruk dari program pariwisata

di Sumenep. Selanjutnya, nilai-nilai ini akan diturunkan dalam rumusan-rumusan norma umum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan evaluasi bagi program pariwisata di Sumenep.

Pada bagian ini, penting pula dikemukakan asas dan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal (2) disebutkan sebelas asas penyelenggaraan pariwisata, yakni: asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Selanjutnya, pada pasal (5) disebutkan:

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik

dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan

h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata dalam undang-undang ini sudah menyebutkan nilai-nilai mendasar dalam penyelenggaraan pariwisata. Berdasarkan uraian masalah-masalah di bagian sebelumnya tentang permasalahan pariwisata di Kabupaten Sumenep, tampak bahwa ada beberapa prinsip yang penting untuk digarisbawahi. Misalnya prinsip manfaat untuk kesejahteraan rakyat, prinsip keadilan, dan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal.

Pada bagian sebelumnya, telah disebutkan bahwa setidaknya ada tiga masalah pokok dalam program pariwisata di Kabupaten Sumenep, yakni masalah desain dan fokus program, partisipasi masyarakat, dan masalah keberpihakan. Tiga masalah ini terkait erat dengan nilai atau asas manfaat, asas partisipatif, asas adil dan merata, dan asas berkelanjutan.

#### 1. Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan ini secara umum dapat dimaknai bahwa program pariwisata yang diselenggarakan telah menjamin dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan di masa depan. Keberlanjutan ini dapat ditafsirkan dan diidentikkan dengan asas

kelestarian, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam, termasuk juga aspek budaya.

Namun demikian, asas berkelanjutan ini dapat juga ditafsirkan bahwa program pariwisata yang dikembangkan mestinya bersifat padu (koheren) dengan apa yang sudah hidup dan dinilai baik di dalam kehidupan masyarakat. Potensi, kecenderungan, dan daya unggul yang ada dirawat secara berkelanjutan dalam proses merancang, merencanakan, dan memilih fokus program.

Dalam kasus program pariwisata di Kabupaten Sumenep, tampak bahwa aspek berkelanjutan dalam pengertian yang terakhir ini kurang mendapatkan perhatian. Indikatornya, pemerintah Kabupaten Sumenep tidak menempatkan wisata religi sebagai wisata unggulan. Padahal, berdasarkan data kunjungan wisatawan di tahun-tahun sebelumnya, wisata religi di Sumenep adalah sektor yang paling menyedot pengunjung.

Jadinya, objek wisata religi di Kabupaten Sumenep tidak mengalami perbaikan yang signifikan dari segi sarana atau infrastruktur. Demikian pula, objek wisata sejarah dan budaya yang cukup menyedot perhatian wisatawan mancanegara tidak diberi perhatian khusus, seperti Kraton Sumenep, Masjid Jamik Sumenep, dan Pantai Lombang. Padahal, dua objek wisata ini pun bahkan sangat mungkin akan mampu menyedot perhatian wisatawan domestik jika mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangannya.

Karena itu, tidaklah begitu mengherankan jika pada pelaksanaan program Visit Sumenep 2018, ikon wisata yang hendak dibangun, yakni Pulau Gili Iyang, tidak cukup berhasil menggaung

bahkan di tingkat lokal Sumenep. Wisata kesehatan atau wisata alam ini pun bahkan kalah bersaing dengan objek wisata baru di Pulau Gili Genting, yakni Pantai Sembilan, yang justru dikelola bukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

## 2. Asas Manfaat dan Asas Adil dan Merata

Asas manfaat dan asas adil dan merata ini terkait dengan aspek keberpihakan dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Pariwisata termasuk jenis industri yang berpotensi untuk melibatkan kalangan pengusaha bermodal besar yang dalam praktiknya rentan meminggirkan kepentingan-kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Contohnya adalah kasus pembangunan dan pengembangan bandara yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat tertentu dari kelas menengah ke bawah. Posting Facebook A. Dardiri Zubairi yang dikutip sebelumnya memperlihatkan secara cukup detail masalah kepentingan ini. Dalam posting yang lain, A. Dardiri Zubairi secara kritis mempertanyakan pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan program-program pariwisata di Kabupaten Sumenep. Kasus pembelian lahan yang cukup marak beberapa tahun terakhir di wilayah timur Kabupaten Sumenep yang dinilai oleh sebagian kalangan telah melanggar peraturan tentang rencana tata ruang daerah juga terkait dengan masalah keberpihakan.

Asas manfaat, adil dan merata ini pada prinsipnya sangatlah ditekankan dalam norma Islam maupun jika kita melihatnya dari sudut pandang kearifan lokal. Pemerintah sebagai fasilitator dan pelaksana kedaulatan rakyat seharusnya menjaga amanah dengan

berusaha untuk menjadikan program-program yang dilaksanakannya dapat memberi manfaat kepada seluruh unsur masyarakat, khususnya dari kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Dalam teori tentang keadilan, dijelaskan beberapa jenis keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan lintas-generasi. Keadilan distributif memastikan bahwa sumber daya terkait pariwisata dan akses terhadapnya secara merata dapat diakses oleh semua kalangan. Semua kelompok masyarakat memiliki hak untuk dapat ikut serta dalam program-program pariwisata. Keadilan sosial menjamin bahwa kelompok-kelompok rentan tidak dicerderai hak-haknya dan diperlakukan secara adil. Keadilan lintas-generasi berkaitan dengan kelestarian dan hak generasi yang akan datang untuk juga menikmati lingkungan hidup, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang sama-sama bernilai dan memberi manfaat bersama.

Salah satu hal yang penting digarisbawahi pada asas manfaat ini adalah bahwa kemanfaatan pariwisata tidak boleh dilihat semata dari aspek ekonomi belaka. Dimensi budaya pariwisata sangatlah penting juga untuk dikemukakan dan digali pada program-program pengembangan pariwisata. Bagaimanapun, pariwisata juga adalah kesempatan untuk mempertemukan orang-orang dengan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, agama, negara yang berbeda. Dalam konteks yang seperti ini, pariwisata dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran yang konkret bagi masyarakat tentang toleransi dan menghargai.

Dalam bahasa agama, pariwisata ini dapat bermanfaat sebagai sarana dakwah. Selain menebarkan kebaikan dan keunggulan

yang dimiliki oleh masyarakat lokal, pariwisata juga dapat menjadi ruang belajar bersama. Seperti dibahas sebelumnya pada perspektif kearifan Madura tentang bertamu, tuan rumah dan tamu sama-sama bisa belajar menghargai.

### 3. Asas Partisipatif

Pengembangan pariwisata semestinya melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasinya. Asas partisipatif ini bila dicermati sangat terkait juga dengan asas manfaat dan asas adil dan merata. Kemanfaatan dan pemerataan dapat lebih mungkin terwujud jika dalam semua proses yang dilewati lebih banyak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada.

Untuk kasus di Kabupaten Sumenep, partisipasi ini secara khusus juga dalam kaitannya dengan tokoh-tokoh agama, mengingat di Kabupaten Sumenep banyak sekali lembaga-lembaga keagamaan (pesantren) dan tokoh-tokoh agama yang perannya cukup berakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pelibatan tokoh-tokoh agama ini paling tidak diharapkan juga dapat menyerap pembicaraan dan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat bawah, karena tokoh-tokoh agama ini biasanya memiliki akses yang cukup intens dengan kelompok masyarakat kelas bawah.

Terbatasnya ruang publik yang representatif untuk menyampaikan gagasan dan masalah yang dihadapi masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Namun keberadaan media sosial cukup membantu keterbatasan ini. Hanya saja, persoalan pokoknya terletak pada kehendak politik pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan suara-suara masyarakat di ruang-ruang publik

informal ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan khususnya terkait pengembangan pariwisata di Sumenep pada khususnya.

Ketiga asas dan prinsip terkait di atas merupakan hal pokok yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan program-program pariwisata khususnya di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur ke depan. Dari paparan singkat ini, setidaknya juga dapat dipahami bahwa asas dan prinsip tersebut dapat menjadi titik tolak evaluasi bagi program pengembangan pariwisata sebagaimana yang dijelaskan sekilas pada bagian sebelumnya.

### **Simpulan**

Dari pembahasan mulai bab pertama hingga bab kelima, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ada tiga masalah pokok yang mengemuka dalam pengembangan program pariwisata di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Tiga masalah pokok itu adalah masalah desain dan fokus program pariwisata yang belum tertata secara baik (belum koheren dan berbasis data), partisipasi yang belum maksimal, dan belum mengemukanya pertimbangan keberpihakan pada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk itu, ada beberapa asas dan prinsip yang perlu digarisbawahi dan dikemukakan yang kiranya dapat menjadi kerangka etis bagi pengembangan program pariwisata di Kabupaten Sumenep. Setidaknya ada tiga asas dan prinsip, yakni asas keberlanjutan, asas manfaat, adil dan merata, dan asas partisipatif.

Penelitian ini lebih banyak menggali aspek normatif bagi pengembangan program pariwisata di Kabupaten Sumenep.



Berdasarkan penelitian ini yang di antaranya juga berbasis observasi, di lapangan ada banyak aspek yang bisa diteliti lebih mendalam, seperti terkait dampak pembukaan objek-objek wisata baru yang dikelola oleh masyarakat lokal, baik itu oleh pemerintah desa maupun oleh pihak swasta.

Kegairahan objek-objek wisata baru ini di satu sisi dapat dilihat sebagai wujud inisiatif masyarakat lokal untuk juga terlibat dengan aspek pembangunan tertentu. Masalahnya adalah apakah pengelola objek-objek wisata baru tersebut memiliki visi yang cukup kaya dan koheren dengan program pemerintah daerah dan juga dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pariwisata secara umum baik berdasarkan perspektif normatif undang-undang pariwisata, norma Islam/agama, maupun norma yang berbasis kearifan lokal.

Selain masalah dampak yang mungkin muncul dan visi aktor-aktor lokal, kiranya menarik pula diteliti lebih mendalam respons para pengunjung wisata baik itu wisata religi maupun wisata alam di Sumenep untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depan bagi program pengembangan pariwisata. Suara yang bersifat evaluatif ini dapat berasal dari kalangan lokal/domestik maupun dari wisatawan mancanegara.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2010, "Tourism Industry; Rekam Jejak Peristiwa dan Perubahan Budaya," *Jurnal Karsa*, Vol. XVIII, No. 2, Oktober 2010, 85-95.
- Aditjondro, George Junus, 2003, *Korban-Korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afifi, Mohammad, 2007, "Sape Sono': Kontes Kecantikan Sapi Madura," tesis di program S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ahmad, Zainollah, 2018, *Babad Modern Sumenep: Sebuah Telaah Historiografi*, Yogyakarta: Alaska.
- Al Jundi, dkk, 2016, "Perkembangan Pariwisata di Banyuwangi Pada Tahun 2000-2015," *Jurnal Humanis*, Vol. 17, No. 2, November 2016, 36-42.
- Arifin, Johar, 2015, "Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang Pariwisata," *Jurnal An-nur*, Vol. 4, No. 2, 2015, 147-165.

- Baalbaki, Rohi, 1995, *Al-Mawrid: A Modren Arabic English Dictionary*, Beirut: Dar al-Ilm Almalayin.
- BPS Sumenep, 2017, *Kabupaten Sumenep dalam Angka*, Sumenep: BPS Sumenep.
- Cheng, Yin Cheong, 2005, *New Paradigm for Reengineering Education: Globalization, Localization and Individualization*, Dordrecht: Springer.
- Echols, John M., dan Shadily, Hassan, 2010, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Evita, Rossi, dkk, 2012, “Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali,” *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail, 1986, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar Maktabah al-Hilal.
- Ibnu Shalah, 1998, *Ulum al-Hadis*, tahqiq Dr. Nuruddin ‘Athar, Damaskus: Dar Fikr.
- Indriastuti, Dewi, 2017, “Mendongkrak Daya Saing,” *Harian Kompas*, 21 April 2017.
- al-Jauzi, Ibnu Qayyum, 1973, *I’lam al-Muwaqqi’in an Rabbi al-Alamin*, Beirut: Dar Jail.
- Karim, Abuya Busyro, 2010, “Pariwisata; Antara Tuntutan Industri dan Kearifan Lokal,” *Jurnal Karsa*, Vol. XVIII, No. 2, Oktober 2010, 147-159.
- Karim, Shofwan, 2013, “Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Tajdid*, Vol. 16, No. 1, Juli 2013, 117-126.
- Kurniawan, Fery, 2011, “Pemanfaatan Sumberdaya Pulau Kecil untuk Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur),” tesis pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

- Maha Rani, Deddy Prasetya, 2014, “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang),” *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3, No. 3, Agustus-Desember 2014, 412-421.
- Murwandani, Nunuk Giari, 2007, “Arsitektur-Interior Keraton Sumenep sebagai Wujud Komunikasi dan Akulturasi Budaya Madura, Cina dan Belanda,” *Dimensi Interior: Jurnal Desain Interior*, Vol. 5 No. 2 (2007).
- Nugroho, Alois A, 2013, “Masalah-Masalah Etika dalam Industri Pariwisata,” dalam *Proceeding Konferensi Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (Hidesi) ke-23* di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.
- al-Qasimi, Jamaluddin, t.t., *Mahasin al-Ta’wil*, Kairo: Maktabah al-Halabi.
- al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad Al-Anshari, 1993, *al-Jami’ Li Al-Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Quthub, Sayyid, 2001, *Fi Zhilal al-Quran*, Juz 5, Kairo: Dar Syuruq.
- Rifai, Mien Ahmad, 2007, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Shihab, Prof. Dr. M. Quraish, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 15, Jakarta: Lentera Hati.
- Sukimi, Mohamad Fauzi B., 2004, “Carok sebagai Elemen Identiti Manusia Madura”, *Akademika* 65, Julai 2004, 91-110.
- Syahriza, Rahmi, 2014, “Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata *Sara* dan Derivasinya dalam al-Qur’an),” *Jurnal Human Falah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, 135-145.
- Tulistyantoro, Lintu, 2005, “Makna Ruang pada Tanean Lanjhang di Madura,” *Dimensi Interior*, Vol. 3, No. 2, 2005, 137-152.
- Wiryoprawiro, Zein M., 1986a, *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif*,

Surabaya: Laboratorium Arsitektur Tradisional FTSP ITS Surabaya.

Wiryoprawiro, Zein M., 1986b, *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*, Surabaya: Bina Ilmu.

Wiyata, A. Latief, 2002, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS.

Zarga', Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad, 1989, *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, cet II, Damaskus: Dar Qalam.

Zubairi, A Dardiri, 2013, "Pulau (Bukan) Untuk Dijual," *Koran Madura*, 12 November 2013.

### **Berita Media Massa**

"Antisipasi Dampak Wisata Bahari," Harian *Kompas*, 3 April 2017.

"Bandara Trunojoyo Resmi Layani Wings Air Rute Sumenep-Surabaya," *Kompas Online*, 27 September 2017, Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/27/203306026/bandara-trunojoyo-resmi-layani-wings-air-rute-sumenep-surabaya>

"Bandara Trunojoyo Sumenep Resmi Dioperasikan," *Detik.com*, 30 November 2010, Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/1505621/bandara-trunojoyo-sumenep-resmi-dioperasikan>

"Catat Agenda Wisata Sumenep 2018 sebelum Berlibur ke Madura," *Kompas Online*, 6 Desember 2017, ditulis oleh Muhammad IRzal Adiakurnia, Sumber: <https://travel.kompas.com/read/2017/12/06/160900927/catat-agenda-wisata-sumenep-2018-sebelum-berlibur-ke-madura>

"Festival Batik Sumenep Dinilai Hanya Ajang Pamer Aurat," *Koran Madura*, 9 Desember 2017.

"Ini Saran Ketua Prodi Pariwisata Unibraw Soal Visit Sumenep 2018," *Koran Madura*, 14 April 2017 Sumber:

[http://www.koranmadura.com/2017/04/14/ ini-saran-ketua-prodi-pariwisata-unibraw-soal-visit-sumenep-2018/](http://www.koranmadura.com/2017/04/14/ini-saran-ketua-prodi-pariwisata-unibraw-soal-visit-sumenep-2018/)

“Jadi Unggulan Pemkab, Gili Iyang Minim Pengunjung,” *Koran Madura*, 4 April 2018, Sumber: <http://www.koranmadura.com/2018/04/jadi-unggulan-pemkab-gili-iyang-minim-pengunjung/>.

"Launching Visit Sumenep 2018, Tulisan di Panggung Jadi Bahan Tertawaan, *Koran Madura*, 5 Desember 2017, Sumber: [http://www.koranmadura.com/2017/12/ launching-visit-sumenep-2018-tulisan-di-panggung-jadi-bahan-tertawaan/](http://www.koranmadura.com/2017/12/launching-visit-sumenep-2018-tulisan-di-panggung-jadi-bahan-tertawaan/)

“PCNU Sumenep Keluarkan Maklumat Agraria dan Pariwisata”, *NU Online*, Senin, 23 Oktober 2017, Sumber: <http://www.nu.or.id/post/read/82435/pcnu-sumenep-keluarkan-maklumat-agraria-dan-pariwisata>

“Pemprov Jatim Kenalkan Sumenep ke Mata Dunia,” *Jawa Pos*, 9 April 2017.

“Sumenep Garap Wisata Berbasis Warga,” *Harian Kompas*, 29 Agustus 2017.

“Sumenep Jagokan Pulau Awet Muda sebagai Destinasi Wisata Unggulan,” *Tempo*, 13 April 2017.

“Sumenep Terus Kembangkan Sektor Pariwisata,” *Koran Jakarta*, 26 Desember 2016.

“Sumenep Dinobatkan sebagai Kota Keris,” *Radar Madura*, 11 Agustus 2017, Sumber: <https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/08/12/7180/sumenep-dinobatkan-sebagai-kota-keris>

"Taman Tectona Kini jadi Primadona Baru Destinasi Wisata di Sumenep", *Media Madura*, 3 Januari 2018, Sumber: <https://mediamadura.com/2018/01/03/taman-tectona-kini-jadi-primadona-baru-destinasi-wisata-di-sumenep/>

"Tambak Udang Tak Bolch Ganggu Pariwisata", *Radar Madura*, 20 September 2017, Sumber:

<https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/09/20/14554/tambak-udang-tak-boleh-ganggu-pariwisata>

"Visit Sumenep Kurang Promosi, Disparbudpora, Diskominfo, dan Humas Kena Semprot Bupati", *Koran Madura*, Sabtu, 13 Oktober 2018, Sumber: <http://www.koranmadura.com/2018/10/visit-sumenep-kurang-promosi-disparbudpora-diskominfo-dan-humas-kena-semprot-bupati/>